

and proper test, adalah sebagai berikut:

NO. NAMA	CALON JABATAN
1. Drs. ENTJENG SHOHIRIN NADJ.	Peneliti & Program pada LP3ES Anggota MPPI
2. Ir. ENI SUHAENI BAKRI	Auditor Ahli dari Masyarakat Standardisasi (MASTAN)
3. Ir. RIFANA ERNI, MBA.	Auditor Ahli dari Masyarakat Standardisasi (MASTAN)
4. Prof. DR. JOHANNES GUNAWAN, SH, LL.M.	Guru Besar Univ. Parahyangan Bandung Dosen Magister Univ. Pasundan Bandung
5. DR. Ir. ICHJAR MUSA, SE, MM, MH.	Dosen Pasca Sarjana Univ. Pajajaran Bandung
6. Prof. DR. ANDI SOFYAN, SH, MH.	Dosen Pasca Sarjana Univ. Hasanuddin Makasar
7. YUSUF SHOFIE, SH, MH.	Dosen Pasca Sarjana Univ. Indonesia dan Universitas Yarsi, Jakarta
8. SUHARTINI HADAD	Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan. Ketua Majelis Anggota JARI
9. Dra. INDAH SUKMANINGSIH, MPM.	Pengurus Harian YLKI
10. Drs. GUNARTO, MM.	Staf Ahli LPKSM dari LP2K Semarang
11. FRANCISCUS WELIRANG	Anggota Komite KP2KKN Jawa Tengah Wakil Presdir PT. Indofood Sukses Makmur. Ketua Umum Asosiasi Prod. Tepung Terigu
12. Ir. HANDAKA SANTOSA	Wakil Ketua KADIN Jakarta Pusat
13. TUTUM RAHANTA LIE	Ketua Harian Asosiasi Pengurus Ritel Indonesia (APRINDO)
14. SRIE AGUSTINA, ME.	Kepala Pusat Dagang Kecil dan Menengah Departemen Perdagangan
15. Ir. A. EDY HERMANTORO, MSi.	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM
16. Prof. Dr. Ir. H. SAN AFRI AWANG, MSc.	Guru Besar Univ. Gajah Mada
17. H.M. YAMIN FERRYANTO, SE, MBA.	Direktur Utama PT. SUMAJAYA
18. Hj. AISYAH HAMID BAIDLOWI	Anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Candekiawan Muslim Indonesia-ICMI
19. CHAIRULHADI M. ANIK, SE.Ak, MBA, PhD.	Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Trisakti, Jakarta

Totok meminta kepada calon anggota BPKN periode 2009-2012 yang nanti akan terpilih dalam forum rapat khusus pleno Komisi VI dapat melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara melalui BPKN ini.

Fit and proper test calon anggota BPKN periode 2009-2012 diskors sampai masa

sidang yang akan datang, karena masih ada satu orang lagi yang tidak bisa mengikuti fit and proper test dengan alasan yang dapat dipahami oleh DPR, ujar Totok. **(iwan)**

## Kasus Ambalat :

# DPR MINTA PEMERINTAH KEDEPANKAN DIPLOMASI

Ketua DPR meminta Pemerintah mengedepankan dan mengoptimalkan saluran diplomasi dan bersikap tegas terhadap negara Malaysia yang sering melewati batas kedaulatan Indonesia. "Kita tidak boleh bersifat lunak terhadap bangsa dan negara lain yang meremehkan dan mencederai kedaulatan negara kita. Kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak boleh terulang lagi," kata Ketua DPR saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Jumat, (3/7).

Menurut Agung, Rakyat menginginkan peran negara yang kuat dan berwibawa di hadapan bangsa lain menyangkut masalah Pulau Ambalat dan pulau-pulau lain di perbatasan. "Dalam kaitan ini, penting bagi kita semua untuk mempertimbangkan kembali besaran anggaran pertahanan kita bila melihat masih tingginya gangguan keamanan di perbatasan," tegasnya.

Selain itu, terang Agung, Pemerintah juga harus memikirkan untuk mulai membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan

Indonesia. "Pembangunan perbatasan bukan hanya akan meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat di perbatasan tetapi juga akan memudahkan kita dalam melakukan patroli perbatasan demi keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI," katanya. **(si)**



## KOMISI VI DPR SETUJUI 5 (LIMA) PROGRAM RKP 2010 KEMENTERIAN NEGARA BUMN

000000 00 000 00000000000 00000000 000000 000000000000 00000000  
000000 000000 000000 0000000 (0000) 000000 000000000 000000  
000000000000 (000) 000000 2010 0000000000 00000 000000000.

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi VI Totok Daryanto yang didampingi Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) saat memimpin Rapat Kerja dengan MENEG BUMN Sofyan Jalil, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (29/6).

“Salah satu prioritas RKP Tahun 2010 adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial,” ujar Totok.

Selain itu jelas Totok, DPR juga meminta agar penyusunan program-program tersebut agar saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Totok Daryanto meminta prioritas RKP tersebut dijabarkan dalam program pembangunan oleh Kementerian dan Badan sebagai pelaksana fungsi eksekutif.

Lebih lanjut, jelas Totok, Komisi VI juga

meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009. “Pagu yang diharapkan dan Pagu Indikatif Kementerian Negara BUMN Tahun 2010 sebesar Rp 114,203 miliar,” ujarnya. Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Negara BUMN.

Namun demikian, kata Totok, masih diperlukan informasi tambahan terkait dengan usulan program dan kebijakan yang akan dituangkan dalam RKP Tahun 2010 dan Penyusunan RAPBN Tahun 2010.

Sementara itu, Meneg BUMN Sofyan Jalil dalam paparannya mengatakan, Kementerian Negara BUMN akan turut mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut melalui pembinaan terhadap BUMN yang terkait langsung dengan sektor tersebut.

Lebih lanjut Meneg BUMN mengatakan, secara umum, pelaksanaan

kebijakan pengelolaan BUMN dalam RKP 2009 sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan di masa yang akan datang, kata Sofyan Jalil. “Sehingga akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi BUMN dan perekonomian secara umum,” terangnya.

Oleh karena itu, jelas Sofyan Jalil, arah kebijakan pengelolaan BUMN dalam RKP 2010 masih akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam RKP 2009.

Berkaitan dengan Pagu Indikatif, Meneg BUMN Sofyan Jalil dihadapan anggota Komisi VI mengusulkan, tambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Karena Pagu Indikatif Kementerian Negara BUMN Tahun 2010 yang telah ditetapkan sebesar Rp 114,20 miliar.

Usulan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Negara BUMN dan pelaksanaan kajian-kajian hukum. Diantaranya, untuk kajian akademis penyempurnaan UU No.19/2003 tentang BUMN, terangnya. (Iwan)

## KOMISI VI DPR SETUJUI 3 (TIGA) PROGRAM RKP 2010 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

000000 00 000 00000000000 00000000 000000 000000 00000000000 0000000000 000000 (0000) 000000  
00000000 000000 00000000000 (000) 000000 2010 0000000000 00000 000000000.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Kepala BKPM Yus’an, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (29/6).

“BKPM diminta untuk penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya,”

pinta Anwar Sanusi.

“Diantaranya salah satu prioritas RKP Tahun 2010 adalah peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim,” ujarnya.

Lebih lanjut, jelas Anwar, Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009. “Pagu yang diharapkan dan Pagu Indikatif BKPM Tahun 2010 sebesar Rp 364,967 miliar,” ujarnya. Pembahasan lebih lanjut secara

komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BKPM, tambah Anwar.

Komisi VI meminta kepada BKPM untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009.

“Ini terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 hingga 26

Juni 2009 di BKPM sebesar Rp 136,627 miliar atau mencapai 36,26 persen dari pagu anggaran," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKPM Yus'an dalam paparannya mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, prioritas keempat pembangunan adalah pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

Yus'an menambahkan, kebijakan program dan prioritas yang akan dituangkan BKPM dalam RKP 2010 untuk pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan

energi dapat dikelompokkan dalam tiga program. "Yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi," jelasnya.

Dalam pertemuan Wakil Ketua BKPM Yus'an mengatakan, BKPM pada tahun anggaran 2009 mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 376,815 miliar. "Alokasi pagu APBN BKPM tahun anggaran 2009 dibagi ke dalam empat program, diantara salah satunya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, agar pelaksanaan serapan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan optimal sehingga program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. "Upaya-upaya yang dilakukan BKPM diantara salah satunya adalah melakukan identifikasi atas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, untuk kemudian diberikan solusi alternatif serta optimalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud," terang Yus'an. **(Iwan)**

## KOMISI I TERIMA MASUKAN PENGAMAT MILITER

**KOMISI I DPR MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN PENGAMAT MILITER DIANTARANYA KUSNADI HADI, DON KLADIUS MARUT DAN HARI PRIHANTONO YANG DIPIMPIN WAKIL KETUA KOMISI YUSRON IHZA MAHENDRA DIRUANG RAPAT KOMISI I.**

Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, Senin (29/6) melakukan audiensi dengan pengamat militer diantaranya Kusnadi Hadi, Don Kladius Marut dan Hari Prihantono yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Yusron Ihza Mahendra diruang rapat Komisi I.

Kusnadi Hadi menjelaskan bahwa dalam menjalankan Alutsista diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan mumpuni. "Orang-orang di logistik mampu untuk melakukannya," katanya.

Dihadapan Komisi I DPR, ia menerangkan bahwa salah satu fungsi dari pertahanan adalah melindungi kepentingan nasional termasuk ekonomi. Dengan terlindunginya sisi itu maka roda perekonomian akan terus berputar dan memberi dampak positif bagi negara.

"Pertahanan salah satu tujuannya untuk mengamankan ekonomi," ujar Kusnadi.

Lebih jauh, menurut Kusnadi, Indonesia yang memiliki wilayah sangat

luas dan sumber daya alam melimpah harus mempunyai kemampuan mumpuni dalam mengawasi segala sesuatu yang terdapat didalamnya.

"Sumber daya alam ini harus dijaga dengan pertahanan yang kuat," katanya.

Sementara itu Don Kladius Marut dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa pembelian 39 kapal laut eks Jerman Timur

sangat mengecewakan. Menurutnya pembelian kapal bekas tersebut hanya menguntungkan pihak penjual.

Ia menilai kapal itu tidak layak operasi dan sudah berumur tua. "Kapal ini waktu dibeli sebetulnya tidak layak operasi bahkan salah satunya hampir tenggelam di Selat Gibraltar," jelasnya.

Don menjelaskan pembelian kapal laut itu juga telah menjadi kontroversi di dunia internasional. Menurutnya hal itu terkait dengan pembayaran melalui utang luar negeri. Pembelian kapal perang dari Jerman Timur sudah memberi contoh bahwa ada masalah besar dengan utang luar negeri.

Lebih jauh menurutnya, pembelian kapal tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan Indonesia. **(bs)**

## KOMISI II UNDANG PAKAR KEARSIPAN UNTUK Mencari Masukan

Komisi II DPR RI mengundang beberapa pakar Kearsipan untuk mendapatkan berbagai masukan terkait dengan pembahasan RUU tentang Kearsipan. Pakar-pakar dari akademisi tersebut adalah Noerhadi Magetsari, Fuad Gani dan Machmud Effendi.

Dalam rapat dengar pendapat umum, Selasa 30/6 yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD), Wakil Ketua

Sayuti Asyathri (F-PAN) mengatakan, selama ini banyak orang menilai arsip dianggap tidak terlalu penting. Padahal suatu saat orang akan melihat rekam jejak, rekaman nilai-nilai, adat istiadat yang kesemuanya itu jika tidak disimpan dan dikelola dengan baik, maka akan sulit lagi mencarinya atau bahkan tidak dapat ditemukan.

Menurut Sayuti, kekurangtertarikan

masyarakat akan arsip ini juga dikarenakan kurangnya komunikasi, sehingga arsip sering dianggap informasi-informasi yang punah. Arsip sering diidentikkan dengan dokumen-dokumen yang hanya disimpan dalam ruangan dingin.

Anggota F-PPP Romzi Nihan menambahkan, dalam praktek keseharian memang banyak orang yang tidak peduli tentang arsip ini. Padahal tanpa disadari kegunaan arsip ini sangat penting sekali.

Bahkan di kantor pemerintahan banyak yang tidak tertarik untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis. Mereka lebih tertarik untuk menduduki jabatan struktural. Arsip dianggap barang mati yang tidak dapat berkembang.

“Bagaimana caranya agar barang yang penting ini menjadi menarik dan diminati banyak orang untuk mengelolanya secara baik,” tanya Romzi. Tentunya hal ini perlu dipikirkan untuk dapat dimasukkan dalam salah satu pasal RUU Kearsipan.

Dalam RUU ini, kata Romzi, harus dapat menjadikan lembaga arsip menjadi lembaga yang penting dan tidak dipandang sebelah mata. Jangan kita mengulangi pengalaman pahit dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI dan masih banyaknya sengketa-sengketa perbatasan lainnya yang seharusnya tidak terjadi seandainya arsip dikelola dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Ketua

Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia Fuad Gani mengatakan, arsip adalah sumber informasi penting yang dapat memberikan sumber bukti yang terpercaya dan sah mengenai suatu keputusan dan tindakan.

Kekacauan sistem penyimpanan arsip akan mengantarkan kepada sulitnya menentukan pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan untuk meminta pertanggungjawaban seseorang.

Fuad menambahkan, arsip publik yang relevan dan akurat harus tersedia jika pemerintah ingin menegakkan aturan hukum dan menunjukkan perlakuan yang adil, sama dan konsisten terhadap setiap warga negaranya.

Menurut Fuad, sebagai negara besar dengan kekayaan alam melimpah, budaya yang beragam dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia masih ketinggalan dalam tata pamong informasi yang berbasis pada manajemen arsip yang baik.

Keadaan ini menurut Fuad, salah satunya tercermin pada hanya sebagian kecil lembaga yang menjalankan manajemen kearsipan secara komprehensif dan benar. Keadaan ini banyak disebabkan oleh kurang serius atau sifat ambivalen manajemen atau pimpinan terhadap pentingnya arsip.

Selain itu, dia juga menilai masih kurangnya tenaga kearsipan yang professional. Citra sebagai profesi kelas

dua, gaji yang kecil dan penghargaan yang minim dan resiko yang tinggi menyebabkan orang kurang berminat menggeluti profesi ini.

Lebih jauh Fuad menambahkan, dasar dari semua kewenangan manajemen arsip adalah aturan hukum yang paripurna dan mengikuti perkembangan jaman. Untuk itu, UU Arsip harus menjamin perlindungan menyeluruh untuk seluruh arsip pemerintah dan memberikan administrasi kearsipan kekuasaan luas untuk mengamankan dan melindungi arsip.

Menurut Fuad, revisi UU Kearsipan adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik. Sebagai dasar pertimbangan dilakukannya revisi UU dimaksud adalah perubahan sistem administrasi hukum dan teknologi, bentuk baru badan pemerintah, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) dan keberadaan arsip elektronik.

Selain itu, terselenggaranya manajemen arsip yang efektif di semua lembaga atau badan pemerintah dan juga swasta, terciptanya standar dan petunjuk penyimpanan arsip pemerintahan yang wajib dilaksanakan, dan terbukanya akses yang lebih luas terhadap informasi pada arsip. (tt)

## KOMISI VI DPR SETUJUI DUABELAS PROGRAM RKP 2010 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM

Keputusan Komisi VI DPR RI tentang persetujuan duabelas program RKP Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2010, yang telah dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa Malam (30/6).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa Malam (30/6).

“Kementerian Koperasi dan UKM

diminta agar dalam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya,” pinta Anwar Sanusi.

“Diantaranya salah satu prioritas RKP Tahun 2010 adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem

perlindungan sosial,” ujarnya.

Anwar Sanusi menambahkan, Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009 dan Pagu Indikatif Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2010 sebesar Rp 739,126 miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar

Pendapat dengan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM, jelasnya.

Komisi VI meminta kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan kegiatan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2009. "Ini terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai bulan Juni 2009 di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp 179.004 miliar atau mencapai 23,87 persen dari pagu anggaran," terangnya.

Dalam paparannya dihadapan anggota Komisi VI, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadhama Ali menjelaskan, sesuai dengan tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2010 yaitu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan mempunyai lima agenda prioritas pembangunan nasional. "Salah

satu diantaranya, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial," tutur Suryadhama Ali.

Disamping program prioritas nasional, jelas Surya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyusun juga program sektoral kementerian.

Lebih jauh ia mengatakan, total pagu anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp 749,764 miliar. Realisasi per tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp 179.004 miliar atau 23,87 persen dari total pagu anggaran. Salah satu rinciannya adalah anggaran pusat sebesar Rp 511,815 miliar dan terealisasi sebesar Rp 140,470 miliar atau 27,45 persen.

Sedangkan, lanjut Surya, anggaran

stimulus fiskal tahun 2009 sebesar Rp 100 miliar dipergunakan untuk membangun 91 unit pasar tradisional di 86 kabupaten/kota dan 12 sarana PKL di 13 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Untuk program stimulus fiskal 2009, kata Surya, secara umum tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. "Hanya saja ada beberapa daerah memerlukan penyesuaian nomenklatur yang tercantum dalam DIPA akibat perubahan struktur SKPD di daerah," ujarnya. Namun demikian, tambahnya, seluruh proses pembangunan ditargetkan selesai bulan Nopember 2009 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

"Jadi sampai saat ini belum ada kendala yang cukup signifikan terkait dengan realisasi anggaran," tutur Suryadhama Ali. (iwan)

## KOMISI VI DPR SETUJUI TIGA PROGRAM RKP 2010 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**000000 00 000 0000000000 0000000 000000 000000 0000000000  
00000000000 000000 (0000) 000000 000000000 000000 000000000000 (000)  
000000 2010 000000000 0000 000000000 0000000000.**

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) yang didampingi dua orang Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) dan Anwar Sanusi (F-PPP) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan KPPU Benny Pasaribu, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (30/6).

"KPPU diminta agar dalam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya," terang Totok.

"Salah satu kegiatan prioritas KPPU dalam RKP Tahun 2010 adalah penegakan hukum persaingan usaha," ujarnya.

Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009 dan Pagu Indikatif KPPU Tahun 2010 sebesar Rp 82,313 miliar. Selanjutnya, kata Totok, Komisi VI akan membahas lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat

Dengar Pendapat dengan Direktur Eksekutif KKPU.

Totok menambahkan, kepada KPPU diminta untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009. "Mengingat masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 di KPPU sebesar Rp 28,772 miliar atau mencapai 35,05 persen dari pagu anggaran," tutur Totok.

Komisi VI menyetujui usulan pagu anggaran yang diharapkan sebesar Rp 199,128 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan gedung KPPU, remunerasi, dan pencapaian program penunjang lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagaimana diamanatkan UU No.5/1999.

Sementara itu Ketua KPPU Benny

Pasaribu dalam paparannya mengatakan, berdasarkan evaluasi atas pencapaian berbagai hasil yang telah diraih KPPU dan tingkat keberhasilan solusi atas masalah-masalah yang ada serta dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dalam dinamika perkembangan ekonomi global, maka KPPU menetapkan program kebijakan yang dinilai masih relevan untuk dilanjutkan pada tahun 2010.

Menurutnya, KPPU harus dapat memainkan perannya sebagai lembaga pengawas persaingan di Indonesia secara optimal agar dapat membantu membenahi kinerja di beberapa sektor ekonomi, industri dan perdagangan. "Guna mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat yang selalu menjadi tema dalam program pembangunan pemerintah," jelasnya.

Hasilnya pada tahun 2010 KPPU mendapatkan peran dalam program persaingan usaha dengan tiga kegiatan prioritas yang sekaligus merupakan program teknis KPPU. "Ketiga kegiatan prioritas tersebut sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam rangka

menunjang kinerja KPPU sebagai wujud nyata dukungan atau kontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan nasional," tutur Benny. Selain tiga kegiatan prioritas tersebut, lanjutnya, KPPU juga menyusun program dasar guna mendukung aspek kelembagaan.

Lebih jauh Benny Pasaribu mengatakan, sebenarnya pada awal tahun 2009 KPPU telah mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp 197,163 miliar, namun ternyata pagu indikatif KPPU telah ditetapkan sebesar Rp 82.313 miliar. "Besaran tersebut dinilai kurang memadai karena belum dapat menampung beberapa prioritas," tutur Benny.

Sementara realisasi anggaran KPPU per 26 Juni 2009 sebesar Rp 28,772 miliar atau 35,05 persen dari pagu anggaran KPPU. "Keterbatasan anggaran inilah kendala yang paling menonjol dalam penyusunan program atau kegiatan KPPU

tahun 2010," teranginya.

## Amandemen UU No.5/1999

Azwir Dainytara (F-PG) dalam pertemuan mempertanyakan kepada KPPU terkait dengan amandemen UU No.5/1999. Apakah UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini perlu ada perubahan atau tidak, tanya Azwir.

Menurutnya, kalau ada perubahan jangan sekarang dulu. Tapi amandemen UU No.5/1999 dapat diajukan pada masa jabatan anggota Dewan periode 2009-2014, kata Azwir seraya menambahkan agar bisa dirumuskan kembali untuk menjadi kekuatan hukum yang sangat kuat.

"Prinsip saya mendukung," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU Benny Pasaribu menjelaskan, bahwa pelaksanaan UU No.5/1999 masih jauh

dari harapan. Beberapa agenda yang masih memerlukan perhatian adalah belum adanya peraturan pemerintah mengenai merger, akuisisi dan kondolidasi. "Meskipun telah diperintahkan secara tegas dalam Pasal 28 dan Pasal 29," teranginya. Selain itu, lanjut Benny, ketiadaan kewenangan penyitaan alat bukti yang menjadi hambatan pemeriksaan dan belum kuatnya status kelembagaan KPPU.

Oleh karena itu, tegas Benny, perlu adanya amandemen atas UU No.5/1999 untuk memperkuat kewenangan, hukum acara serta posisi kelembagaan KPPU. "Agar peran dan upaya kami dalam membentuk persaingan usaha yang sehat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal," tutur Benny Pasaribu. (Iwan)

## RUU SUSDUK GAGAL DISAHKAN

RUU SUSDUK GAGAL DISAHKAN  
RUU SUSDUK GAGAL DISAHKAN  
RUU SUSDUK GAGAL DISAHKAN  
(RUU SUSDUK 3/6) GAGAL DISAHKAN.

Menurut Ketua Panja RUU Susduk Hajriyanto Y. Thohari, masih banyak materi dalam RUU itu yang belum disepakati. Bahkan, kata Hajriyanto, menurut rencana Panja masih akan mengadakan rapat pada Jum'at sore.

Jika RUU ini belum dapat disahkan pada Jum'at ini, direncanakan akan digelar Rapat Paripurna luar biasa. Hal ini mengingat setelah penutupan sidang, anggota memasuki masa reses, sementara RUU Susduk ini mendesak harus segera disahkan.

DPR akan kembali bersidang pada 16 Agustus 2009. Padahal, RUU Susduk harus disahkan sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2009 – 2014 pada 25 Juli 2009.

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi sebagai pengganti Badan Musyawarah (Bamus) Kamis 2/6, pansus melaporkan, pembahasan RUU

Susduk belum selesai dan masih banyak materi yang perlu dibicarakan di tingkat lobi.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Bambang Wuryanto dalam rapat itu juga mengkhawatirkan kalau pengesahan RUU Susduk dipaksakan dijadwalkan Jum'at ini, justru akan melanggar tata tertib DPR.

Pembahasan RUU belum selesai, tetapi rapat menjadwalkan rapat paripurna untuk pengesahannya.

Dalam rapat akhirnya muncul usulan agar pengesahan RUU Susduk dilakukan dalam rapat paripurna yang diadakan pada saat reses atau disebut dengan rapat paripurna luar biasa. "Kemungkinan rapat paripurna luar biasa itu diadakan setelah pemilu presiden 8 Juli mendatang. Mungkin pertengahan Juli," papar Hajriyanto.

Menurut dia, jika rapat paripurna ini digelar, ini pertama kalinya anggota periode 2004 – 2009 menggelar rapat paripurna luar biasa. Rapat ini dimungkinkan karena juga ada dalam Tatib DPR. (tt)

## BILA MEMUNGKINKAN, RUU TIPIKOR DIBAHAS MASA RESES

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, bila memungkinkan DPR akan menggunakan masa reses untuk penyelesaian RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kita masih menunggu laporan pansus. Palsalnya, masih banyak yang harus diperbaiki dalam RUU Tipikor ini. Salah satunya adalah mengenai penyidikan apakah penyidikan itu kewenang

kejaksaan atau KPK," kata Agung Laksono menjawab pers usai pertemuan dengan enam anggota Kongres AS di Gedung DPR Rabu (1/7).

Agung Laksono mengemukakan hal itu sehubungan Pemberitaan di masa bahwa ada beberapa pasal RUU Tipikor yang akan memperlemah KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Dia mengakui, naskah RUU ini berasal dari pemerintah karena itu perlu disempurnakan dalam pembahasan di DPR sekarang ini. "RUU ini memang belum mendukung kinerja KPK karena itu harus disempurnakan melalui pembahasan bersama pemerintah dan Pansus," tambahnya.

Lebih jauh Ketua DPR mengatakan, masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) berada pada kelanjutan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Untuk itu Dewan juga meminta

dukungan KPK untuk merampungkan RUU ini.

"Harus ada semangat kerjasama dan sinkronisasi yang menggambarkan dengan kesungguhan KPK. Jadi tidak semata-mata dibebankan kepada DPR," tegasnya dengan menambahkan, bentuk keseriusan KPK seperti memanfaatkan kewenangan dengan sebaik-baiknya.

Misalnya soal penyadapan, kata Agung, selama menyangkut kasus korupsi tidak menjadi masalah jika disadap. Namun sambungnya, kalau tidak terkait korupsi, penyadapan itu bisa masuk kategori pelanggaran HAM. "Intinya penyadapan itu bukan untuk jebakan tapi untuk mendapatkan informasi," jelas dia.

Secara terpisah, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR telah diminta oleh Ketua Umum Partai Golkar untuk mengesahkan RUU Tipikor sebelum deadline.

Dalam kaitan ini, Fraksi partai Golkar akan berupaya melobi fraksi lain agar bersama-sama mendorong pengesahan RUU Tipikor secepatnya.

"Kita harus mempercepat pengesahan RUU Tipikor. FPG bersama-sama fraksi-fraksi lain ikut aktif membahas sehingga selesai tepat waktu dan tak usah pakai perpu. Mudah-mudahan sebelum pelantikan anggota DPR baru itu sudah selesai," ungkap Ketua Umum PG yang juga wapres baru-baru ini.

Dia menyatakan menyatakan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Saya tidak akan masuk dalam statement melemahkan atau memperkuat, tapi yang terpenting bagi saya KPK harus jalan dengan baik," ia menambahkan. (mp)

## KETUA DPR APRESIASI POSITIF KERJASAMA DENGAN GLIN

KEJAKSAAN NASIONAL (KPK) DAN KOMISI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL (KORPRI), MELAKUKAKAN KEGIATAN BERSAMA SAMA MELALUI KERJASAMA DENGAN GLIN (GLOBAL LEARNING INSTITUTE) PADA HARI Rabu (1/7) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Melalui kerjasama dengan GLIN maka kita akan langsung online ke perpustakaan kongres AS," papar Agung Laksono usai menemui 6 anggota kongres yang tergabung dalam House Democracy Assistance Commission (HDAC) dipimpin oleh senator David Price, di Gedung Nusantara III, Rabu, (1/7).

Menurut Agung, melalui kerjasama tersebut, maka seluruh legislasi dapat di akses secara langsung. "Artinya anggota Dewan tidak perlu studi banding ke negara yang sudah tergabung dalam GLIN," paparnya.

Agung mengatakan, anggota kongres Amerika menilai Indonesia merupakan negara yang demokratis karena itu mereka akan membantu kerjasama dengan GLIN.

"Sekarang ini Parlemen Indonesia bukan hanya lembaga seperti stempel pos semata tetapi DPR sekarang adalah

lembaga yang bertugas mengawal demokrasi di Indonesia," tegasnya.

Keenam anggota parlemen AS tersebut adalah David Price, Jim McDermott, Jim Cooper, Bob Etheridge, Vern Buchanan, dan Phil Gingrey. Mereka direncanakan akan mengunjungi 3 negara diantaranya, Mongolia, Indonesia dan Timor Leste.

### UU ITE tidak mengancam

Ketua DPR mengatakan, UU ITE tidak mengancam kebebasan pers namun perlu disusun peraturan pendukung lainnya agar UU ini sesuai dengan semangat demokrasi.

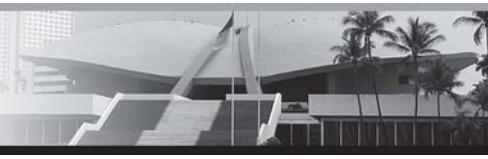
Menyoal RUU Tipikor, Agung menegaskan, RUU ini datang dari pemerintah namun banyak sebagian orang merasa RUU ini masih kurang sempurna artinya draft RUU tersebut kurang memperkuat peran KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. "Karena itu ini harus disusun segera sehingga pasalnya dapat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia nantinya," paparnya. (si)

## TAYANGAN IKLAN DALAM DEBAT PRESIDEN DIPERTANYAKAN KOMISI II

Komisi II DPR RI mempertanyakan penayangan iklan dalam acara debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditayangkan salah satu stasiun televisi. Penayangan iklan ini dirasakan sangat mengganggu di saat

orang sedang serius melihat jalannya acara tersebut.

Hal itu ditanyakan beberapa anggota Komisi II DPR saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan



Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (1/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Seperti disampaikan anggota F-PPP Chozin Chumaidy, debat Presiden dan Wakil Presiden ini adalah peristiwa yang sakral, jadi kalau tiba-tiba dipotong dan diselipkan dengan iklan, hal ini jelas sangat mengganggu sekali.

Seharusnya acara tersebut tidak perlu diselipkan dengan penayangan iklan. Karena anggaran untuk mengadakan debat Presiden dan Wakil Presiden sudah dianggarkan dari awal. "Saya tidak mengerti kenapa sudah dianggarkan dari dana APBN, pihak televisi masih juga mencari iklan, apakah anggaran tersebut kurang" tanya Chozin. Sebab jika dana untuk debat itu kurang, seharusnya dapat melaporkan ke Komisi II DPR, agar dana untuk acara tersebut ditambah.

Senada dengan itu, Mulyono (F-PD) mengatakan, penayangan iklan di saat berlangsungnya acara tersebut tidak elok. Apalagi, kata Mulyono, iklan yang ditayangkan tersebut adalah iklan dari salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya tidak enak, apalagi iklan tersebut iklan SBY dan Budiono yang diusung fraksinya, nanti kita dikira mencari kemenangan dengan cara seperti itu," kata politisi Partai Demokrat ini.

Mulyono juga memproklamasikan adanya polling melalui SMS saat berlangsungnya debat Presiden. Menurutnya, acara tersebut belum dimulai, tapi anehnya sudah ada perolehan SMS yang mendukung salah satu pasangan.

Seharusnya, katanya, polling melalui SMS itu tidak perlu ada, atau jika tetap ada harus di saat acara tersebut sudah berakhir. "Saya tidak ingin ada satu pihak pun yang diuntungkan dari perolehan SMS itu," kata Mulyono.

Menanggapi tayangan iklan saat debat Presiden berlangsung, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari mengatakan, dalam rapat sebelumnya dengan Komisi II DPR dia telah menyampaikan banyaknya permintaan dari berbagai lembaga untuk membantu KPU dalam rangka debat Presiden dan Wakil Presiden.

KPU, kata Hafiz, sebenarnya ingin melaksanakan sendiri dengan biaya sendiri

karena telah tersedia anggaran sebesar Rp 750 juta untuk lima kali debat, yaitu tiga kali debat Presiden dan dua kali debat Wakil Presiden.

Tapi karena pelaksanaan debat itu harus melalui lelang (lebih dari Rp 50 juta harus melalui lelang) sementara KPU dihadapkan dengan waktu yang terbatas, akhirnya KPU mengundang seluruh stasiun televisi dan disepakati merekalah yang menyediakan tempat dan semua perangkat. Tapi, kata Hafiz, tentu saja kendalanya tetap berada di tangan KPU.

Bahkan saat acara berlangsung, tidak ada satu pun ikon dari televisi yang tampil. Namun, memang tidak bisa dihindari adanya tayangan iklan. Bagi stasiun televisi itu, ada tidaknya acara debat, iklan itu tetap berjalan.

Hafiz menambahkan, penayangan

iklan ini juga sudah dikomunikasikan kepada Tim Sukses masing-masing pasangan calon. Pengaturan jeda ini juga dimaksudkan untuk memberikan waktu istirahat kepada pasangan calon, karena kalau harus terus menerus berdiri selama dua jam tentu akan lelah. "Jadi kami membahasakannya bukan iklan, ini istirahat memberi kesempatan kepada masing-masing calon untuk melepaskan lelah sejenak," kata Hafiz.

Dengan adanya kerjasama tersebut, tentu ada sisi positifnya yang awalnya anggaran direncanakan untuk debat sebesar Rp 750 juta, akhirnya yang terpakai hanya 30 persennya saja. Pengeluaran tersebut hanya untuk honor moderator, konsumsi, keamanan. Jadi dalam hal ini, ada zero buget dengan stasiun-stasiun televisi. (tt)

## KOMISI VI DPR SETUJUI DUABELAS PROGRAM RKP 2010 DEPARTEMEN PERDAGANGAN RI

000000 00 000 0000000000 0000000 00000 0000000000  
00000000000 00000 00000000 000000 00000000000 (000) 00000 2010  
000000000 000000000 00000000.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) yang didampingi dua orang Wakil Ketua Komisi VI Muhidin M. Said (F-PG) dan Anwar Sanusi (F-PPP) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (30/6).

"Departemen Perdagangan diminta agar dalam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya," terang Totok.

"Dua belas program terdiri dari lima program pokok dan tujuh program penunjang," ujarnya. Komisi VI, jelasnya, juga meminta rincian sekaligus sandingan pagu tahun 2009.

Ia menambahkan, pagu yang diharapkan dan pagu indikatif Departemen Perdagangan tahun 2010 sebesar Rp

1,305 miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, jelasnya.

Komisi VI meminta kepada Departemen Perdagangan untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009, ujarnya.

"Meningkat masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 di Departemen Perdagangan sebesar Rp 323,717 miliar atau mencapai 24,86 persen dari pagu anggaran," tegasnya.

Sementara itu Menteri Perdagangan dalam paparannya menjelaskan, pada



tahun 2009 Departemen Perdagangan memperoleh alokasi APBN sebesar Rp 1,302 triliun. Realisasi serapan anggaran sampai dengan 25 Juni 2009 sebesar Rp 323,717 miliar atau 24,86 persen untuk membiayai pelaksanaan lima program pokok dan tujuh program penunjang.

Mari membenarkan masih rendahnya serapan realisasi anggaran. "Salah satu diantaranya disebabkan realisasi anggaran sebagian besar berasal dari gaji pegawai, belanja langganan daya dan jasa," paparnya.

Menurutnya, dalam rangka optimalisasi anggaran tahun 2009 Departemen Perdagangan telah melakukan langkah-langkah diantara salah satunya adalah meningkatkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan penajaman skala prioritas dan penyusunan jadwal kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan. "Diperkirakan sampai dengan akhir Desember 2009 realisasi akan mencapai lebih dari 90 persen," terangnya.

Lebih jauh Mari menegaskan, untuk melaksanakan ke dua belas program

Departemen Perdagangan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1,306 triliun dengan rincian program pokok sebesar Rp 933,129 miliar dan program penunjang sebesar Rp 372,234 miliar. Departemen Perdagangan pada tahun 2010 akan melanjutkan kegiatan penting dan strategis untuk mendukung pencapaian pemulihan dan pertumbuhan ekonomi 2010.

"Namun belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat terbatasnya anggaran," tutur Mari Elka Pangestu. **(Iwan)**

## KETUA DPR DIPILIH LEWAT VOTING DI PARIPURNA

.....

**K**etua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo menjelaskan, komposisi Pimpinan MPR juga disepakati berjumlah lima orang, terdiri 3 orang dari DPR dan 2 orang dari DPD, sedangkan keputusannya diserahkan kepada mekanisme masing-masing yaitu DPR dan DPD. Untuk jabatan Ketua MPR juga sama dengan DPR, diputuskan melalui pemungutan suara di sidang paripurna MPR.

Terkait dengan jumlah fraksi DPR, semula ada keinginan untuk menyederhanakan jumlah fraksi dengan syarat minimal jumlah anggotanya dua kali jumlah komisi yang ada di DPR. Komisi DPR periode sekarang ini berjumlah 11, sehingga minimal 22 anggota.

Namun keinginan itu mentah lantaran fraksi-fraksi DPR dan pemerintah akhirnya mengacu ketentuan parpol yang lolos parliamentary threshold ( PT) terdapat 9 partai yang lolos ke DPR, sehingga fraksi yang disepakati juga berjumlah 9.

Anggota Tim Sinkronisasi (Timsin)

Syaifullah Ma'shum mengatakan, Timsin sudah menyelesaikan tugasnya Rabu (1/7) petang, meski masih terdapat beberapa materi yang belum tuntas. Karena itu pembahasannya diserahkan ke Panitia Kerja atau forum loby perwakilan fraksi-fraksi dengan pemerintah. Sejumlah masalah yang belum tuntas itu diantaranya kedudukan DPD, posisi DPRD dan keharusan Presiden untuk hadir menjawab hak angket dan interpelasi DPR.

Terhadap masalah ini Ketua Pansus Ganjar Pranowo menegaskan, mekanisme yang akan ditempuh adalah melalui voting, sebab sebelumnya telah dibahas di tingkat Panja dan Timsin. Mengenai judul, kata dia masih belum tercapai kesepakatan, sebab DPR menghendaki judul RUU Susduk diganti, kata susduk dihapus, sebab tidak hanya mengatur susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

DPR menghendaki judul RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tetapi pemerintah tetap bersikukuh RUU Susduk.

Padahal kata Ganjar, tugas MPR juga mencakup melantik Presiden, amendemen UUD 45 dan pemakzulan. Sedangkan DPR tetap memiliki kekuatan absolut untuk mengajukan hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

### Tak terhambat

Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo menyatakan, pembahasan RUU diharapkan selesai pada saat rapat paripurna menjelang penutupan masa sidang IV Jumat (3/7). Ganjar berharap Timsin bekerja keras untuk menuntaskan RUU ini.

Agung Laksono menambahkan, percepatan pengesahan RUU Susduk dimaksudkan agar pembentukan fraksi dan alat-alat kelengkapan Dewan sesuai pelantikan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak terhambat.

Meskipun DPR masih bisa menggunakan UU Susduk yang lama, namun kata Agung, tatanan parlemen akan lebih baik jika UU Susduk baru yang digunakan. Lembaga-lembaga perwakilan bisa menata dirinya dengan undang-undang baru **(mp)**



# KEAKURATAN DPT PILPRES KEMBALI DITANYAKAN

000000 00 000 00 0000000 00000000000 0000000000 0000000 00000000  
00000 (000) 00000 000000 000000000 000 000000 000000000, 000000  
000 00000 000000000 000000000000 0000. 00000000 000 000 0000000000  
0000000 0000000, 00000000 00000000000 000000 0000000000 0000, 000 000  
0000000 00000000 0000000.

Hal ini ditanyakan beberapa anggota Komisi II saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu sore (1/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Masalah DPT ini juga menjadi salah satu kesimpulan rapat Komisi II yang meminta kepada KPU untuk dapat menjamin keakuratan DPT dan melakukan antisipasi mengambil kebijakan apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS namun tidak tercantum dalam DPT Pilpres.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua KPU, DPT untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang jumlah total keseluruhan 176.395.015 orang. Dengan perincian pemilih dalam negeri berjumlah 175.261.277 dan pemilih luar negeri 1.133.738 orang.

Dibandingkan Pemilu Legislatif lalu, jumlah pemilih mengalami kenaikan sebesar 5.128.573 orang, yang sebelumnya Pemilu Legislatif berjumlah 171.266.422 orang.

Dalam hal ini, anggota F-PKS Jazuli Juwaini menanyakan bagaimana KPU melakukan pemutakhiran data. Karena DPT jangan hanya sekedar bertambah atau berkurang jumlahnya. Semuanya itu harus berdasarkan data yang akurat, untuk itu perlu ada jaminan dan akurasi data.

Jazuli menambahkan, tentunya tahapan-tahapan itu harus dicermati dengan baik, jangan sampai kejadian DPT pada Pemilu Legislatif lalu terulang kembali. Seperti, masih tercantumnya anggota TNI yang aktif, meninggal dunia, bahkan ada anak balita yang tercantum namanya.

Menjawab pertanyaan seputar DPT,

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, masalah DPT ini masalah yang krusial dan KPU memberikan perhatian melebihi dari persoalan yang lain, bahkan termasuk soal anggaran. "Sembilan puluh persen perhatian kami perbaikan daftar pemilih," kata Hafiz.

Selain mengajak partai-partai untuk mencari 10 juta orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih, KPU juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Selama sebulan KPU telah memasang running teks di Metro TV dan TV One untuk mengajak masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih, agar masyarakat juga dapat ikut membantu KPU.

Bukan hanya itu, dalam rangka pemutakhiran data ini petugas-petugas KPU di daerah melakukan door to door mendatangi warga dan bahkan ada yang keliling dengan menggunakan mobil.

Jika ditanyakan penambahan angka DPT sebesar lima juta lebih apakah rasional. Dalam hal ini menurut Hafiz tergantung kepada siapa yang melihatnya. Yang jelas KPU telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjaring sekian juta masyarakat yang tidak terdaftar.

Hafiz menjelaskan, penambahan DPT Pilpres sebanyak lima juta lebih yang terbanyak dari pemilih pemula. Ketika Pemilu Legislatif berlangsung, umur 17 tahun diukur pada tanggal 9 April. Sedangkan Pemilu Pilpres diukur sampai 8 Juli 2009. Dalam waktu tiga bulan itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan.

Selain itu, penambahan itu terjadi karena adanya anggota TNI/Polri yang tadinya aktif sekarang tidak aktif lagi/pensiun. Jumlah penambahan lainnya dari pemilih luar negeri yang pulang ke Indonesia karena PHK atau habis masa

kontraknya. Dan yang lainnya pemilih yang betul-betul belum terdaftar ketika pemilu legislatif.

Sebagai perbandingan, kata Hafiz, pada tahun 2004 jumlah penduduk kita 214 juta orang, sedang jumlah pemilih 148 juta. "Berarti yang tidak memilih sebesar 66 juta orang," kata Hafiz.

Tahun 2009, jumlah penduduk berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 232 juta lebih. Pada Pemilu legislatif jumlah pemilih sebesar 171 juta. Berarti yang tidak memilih 61 juta orang. Dari ke dua data tersebut menunjukkan, jumlah yang tidak memilih pada Pemilu 2009 mengalami penurunan. Ini berarti, KPU telah melakukan pendataan Pemilu tahun 2009 lebih baik.

Hafiz menegaskan, pada dasarnya KPU memegang prinsip tidak boleh ada satu orang pun warga negara Indonesia memenuhi syarat yang tidak terdaftar. Ini prinsip dasar yang dipegang KPU sejak awal," kata Hafiz.

## Berlaku Jujur

Pada kesempatan yang sama, anggota F-PPP Romzi Nihan mengatakan, pelaksanaan Pemilu Legislatif yang lalu sangat menyedihkan. Keinginan untuk menghadirkan Pemilu yang baik tidak dapat diwujudkan.

Untuk itu Romzi menanyakan, apa yang dilakukan KPU sampai dengan jajaran yang paling bawah agar berlaku jujur terhadap tugasnya. Sudah bukan rahasia lagi Pemilu Legislatif yang lalu banyak terjadi kecurangan-kecurangan, bahkan jual beli suara bukan menjadi rahasia umum lagi. "Saya khawatir akan terjadi bencana jika hal itu terjadi lagi pada Pemilu Pilpres," kata Romzi. Karena Pemilu yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menodai proses demokrasi.

Selama ini, kata Romzi, kita harus bangga, Indonesia termasuk negara demokrasi nomor empat terbesar di dunia. Hendaknya kebanggaan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang menyebabkan runtuhnya proses demokrasi yang telah berlangsung cukup baik selama ini.

Agar penghitungan suara dalam Pemilu Presiden berlangsung jujur, adil dan transparan, Komisi II DPR meminta kepada KPU dan jajarannya sampai pada tingkat

KPPS wajib mengumumkan formulir asli C1 yang berupa salinan hasil penghitungan suara seluruh TPS di TPS dan di kantor-kantor kelurahan/desa di seluruh Indonesia sampai dengan ditetapkannya suara secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Komisi II juga mendukung rencana diterbitkannya Surat Edaran bersama antara KPU dan Bawaslu untuk dapat memastikan formulir C1 Pilpres dapat diterima peserta Pilpres dan diumumkan kepada publik sebagaimana diamanatkan

UU Nomor 42 Tahun 2008.

Dalam hal ini, Komisi II juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menjamin terwujudnya transparansi data untuk kepentingan penyelenggaraan Pilpres termasuk didalamnya penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik. **(tt)**

## PANITIA ANGKET TEMUKAN 49 JUTA PEMILIH TERCECER

Temuan kami di lapangan belum ada perubahan signifikan antara DPT Pilpres dan DPT pemilu legislative. Pemilih yang tercecer ada sekitar 49 juta," ungkap Eva di gedung DPR, Rabu (1/7). Dia mengatakan, dari kunjungan panitia ke beberapa provinsi, ditemukan berbagai pelanggaran yang pada intinya mengonfirmasi bahwa verifikasi data belum terjadi. Misalnya saja di Madiun. Padahal kita sudah mengingatkan KPU agar jangan terulang seperti pemilu legislatif, tapi mereka hanya berpangku tangan," kata Eva.

Atas berbagai temuan itu, Panitia Angket DPR akan memanggil 'korban' DPT, birokrat lokal dan penanggung jawab utama Departemen Dalam Negeri, serta Komisi Pemilihan Umum untuk dimintai keterangan dan kesaksiannya dalam proses penyusunan DPT dan pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, Ketua Panitia Angket Gayus Lumbuun yang melakukan kunjungan ke Jawa Timur mengatakan, panitia menemukan indikasi-indikasi kekisruhan dalam DPT. "Kami temukan banyak nama baru yang muncul dan nama-nama lama yang hilang. Masih banyak didapati duplikasi baik nama maupun NIK," ujarnya.

Kekisruhan DPT Pilpres juga menjadi sorotan Komisi II saat rapat sebelumnya dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II menanyakan keakuratan DPT Pilpres, mengingat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa hari lagi. Menurut anggota F-PKS Jazuli Juwaini, DPT Pemilu Legislatif yang lalu banyak terjadi kekacauan.

Masalah DPT ini juga menjadi salah satu kesimpulan rapat Komisi II yang meminta kepada KPU untuk dapat menjamin keakuratan DPT dan melakukan antisipasi mengambil kebijakan apabila

terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS namun tidak tercantum dalam DPT Pilpres.

Berdasarkan data yang disampaikan Ketua KPU, DPT untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang jumlah total keseluruhan 176.395.015 orang. Dengan perincian pemilih dalam negeri berjumlah 175.261.277 dan pemilih luar negeri 1.133.738 orang.

Dibandingkan Pemilu Legislatif lalu, jumlah pemilih mengalami kenaikan sebesar 5.128.573 orang, yang sebelumnya Pemilu Legislatif berjumlah 171.266.422 orang.

Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary justru meragukan pihak-pihak yang menggugat akurasi DPT. "Isu ada sekian juta orang yang tidak bisa memilih, nyatanya itu hanya "katanya". Setelah kami mengirimkan surat kepada parpol-parpol, nyatanya sampai kini tidak ada yang masuk. Bagi KPU, DPT tidak ada yang carut marut," tambahnya. **(tt)**

## KOMISI VI DPR SETUJUI SEPULUH PROGRAM RKP 2010 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Komisi VI DPR menyetujui program RAPBN Departemen Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sebanyak sepuluh kegiatan prioritas.

Hal itu diungkapkan Muhidin M. Said (F-PG) yang didampingi Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (2/7).

"Departemen Perindustrian diminta agar dalam penyusunan kegiatan prioritas

tersebut saling menunjang dan berkesinambungan dengan program dan kegiatan sebelumnya," pinta Muhidin M. Said.

Lebih lanjut Muhidin mengatakan, Komisi VI juga meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Tahun 2009. "Pagu yang diharapkan dan Pagu Indikatif Departemen Perindustrian Tahun 2010 sebesar Rp 1,664 triliun," ujar Muhidin. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan



Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, tambah Muhidin.

Muhidin menambahkan, DPR juga meminta kepada Departemen Perindustrian untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009.

"Mengingat masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 di Departemen Perindustrian sebesar Rp 458,849 miliar atau mencapai 32,71 persen dari pagu anggaran," terang Muhidin.

Dalam paparannya Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, perkembangan aktivitas pelaksanaan DIPA 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 mencapai 32,71 persen atau setara dengan pembelanjaan sebesar Rp 458,849 miliar.

"Meskipun realisasi di Departemen Perindustrian dianggap masih belum maksimal seperti yang diharapkan," kata Fahmi Idris seraya menambahkan namun masih berada di atas capaian realisasi nasional sebesar 30,50 persen.

Fahmi Idris menambahkan, penyebab rendahnya realisasi anggaran salah satu diantaranya adalah bantuan program restrukturisasi industri mesin tekstil dan produk tekstil, gula dan alas kaki dengan pagu anggaran sebesar Rp 360 miliar yang melekat pada anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (Ditjen ILMTA) baru mencapai tahap seleksi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh konsultan.

"Menurut siklusnya, pencairan baru akan terjadi sekitar bulan September 2009," terang Fahmi Idris.

Lebih jauh ia menjelaskan, lambatnya pelaksanaan program restrukturisasi permesinan disebabkan salah satu diantaranya waktu yang dibutuhkan oleh pemohon mulai tahap pemesanan mesin sampai dengan mesin berada di lokasi pabrik adalah 4 s/d 5 bulan. "Sehingga pencairan bantuan baru dapat dimulai pada bulan Juli 2009," tutur Fahmi Idris. (iwan)

## DPR TAK HAMBAT RUU PENGADILAN TIPIKOR

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, JAKARTA. - Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, Muhidin, mengatakan, DPR juga meminta kepada Departemen Perindustrian untuk melakukan langkah percepatan dalam upaya mengoptimalkan realisasi anggaran untuk efektivitas program dan kegiatannya hingga akhir tahun anggaran 2009.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/7) Dewi yang didampingi Pimpinan Pansus lainnya menyatakan, akan melakukan sinkronisasi. " Sinkronisasi penting, jangan sampai nanti tidak aplikatif atau ada perlakuan yang tidak sama kepada warga masyarakat dalam kaitan masalah hukum. " Kalau ini terjadi bisa ada satu kasus di tangani dua pengadilan berbeda. Tidak ada kepastian hukum. Ini yang harus diwaspadai. Kita bukan tunggu tapi sinkronisasi itu perlu," ungkap dia.

Didampingi Wakil Ketua Pansus Arbab Prapoeka dan M. Nurdin, dia menyatakan pihaknya tak ingin membahas RUU ini dipolitisasi karena menyangkut soal yuridis. "Memang RUU Tipikor ini harus disinkronisasikan dengan peradilan umum, karena ibaratnya Pengadilan Tipikor ini anaknya, sedangkan Peradilan Umum ini ibunya. Memang agak sedikit aneh, anaknya mau lahir dulu, ibunya belum," ia menjelaskan.

Menurutnya, Pansus Tipikor berkordinasi dengan Pansus Peradilan Umum untuk bisa memasukkan hal-hal yang diatur Pengadilan Tipikor dalam Peradilan Umum. Ini sudah coba sinkronisasikan mulai sekarang, karena satu bicara system sedang RUU Tipikor merupakan salah satu institusi dari Peradilan Umum.

Kembali dia menyatakan keheranannya, sekarang baru muncul dan mendadak, ketika sedang membahas RUU Pengadilan Tipikor tiba-tiba Pemerintah memasukkan RUU Tipikor. Pada saat Dewan dan pemerintah membicarakan pengadilannya, tiba-tiba keluarlah RUU materilnya. " RUU ini betul-betul baru

masuk, dibicarakan dalam rapat paripurna pekan lalu dan pansusnya belum ada," ujarnya.

Untuk itu perlu penanganan yang hati-hati. Kelihatannya antara draft RUU Pengadilan Tipikor dan RUU Tipikor ada perbedaan yang memerlukan diskusi sebab setiap pembahasan RUU harus sinkron dan koheren. Yang satu pengadilannya yang satu tindak pidana, nanti menyangkut bagaimana beracaranya,

RUU Tipikor ini akan menjadi perhatian yang sangat khusus dari DPR dalam rangka sinkronisasi dengan RUU Pengadilan Tipikor. Dismaping itu juga RUU Money Laundry juga harus disinkorinkan karena money laundry sumbernya dari tindak pidana korupsi akan disidangkan di pengadilan ini padahal RUUnya belum dibahas.

Tak kalah penting berkaitan dengan Komisi Yudisial, karena komisi ini akan mendapat tugas tambahan bagaimana mengawasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini diantaranya pengawasan hakim-hakimnya. Sinkronisasi ini bukan untuk dipertentangkan tetapi dipersamakan sepanjang yang dimuat di UU Tipikor jangan berbeda dengan yang dimuat di Undang-undang lain.

Ditanya mengenai langkah terobosan yang akan dilakukannya, dia akan mencoba menyamakan persepsi dengan pemerintah dalam Panja menyangkut delapan hal isu krusial. Ditegaskan, kita juga tak boleh mencampuradukkan serta merta antara UU KPK tersendiri, UU Tipikor tersendiri dan UU Pengadilan Tipikor, UU Kejaksaan tersendiri. Demikian juga dengan RUU Pencucian Uang dan RUU Komisi Yudisial, semuanya harus koheren.

Mengenai kemungkinan dikeluarkannya Perpu, kata Dewi, sebetulnya kewenangan pemerintah. Tapi DPR melihat, untuk mengeluarkan Perpu harus ada alasan kuat yaitu kegentingan

memaksa. " Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk mengeluarkan Perpu," tegasnya.

Disamping itu, untuk mengeluarkan Perpu salah satu syaratnya kalau ada

kekosongan hukum. " Kondisi sekarang ini tidak dalam keadaan genting. Karena itu KPK bisa tetap jalan, begitu pula dengan kejaksaan dan polisi," ia menambahkan. (mp)

## DPR SIAPKAN SANKSI BAGI KEMENTERIAN YANG RENDAH SERAP ANGGARAN

Perkiraan realisasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga sebesar 28,7% atau senilai Rp 95,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 333,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan, realisasi penyerapan anggaran sampai semester I 2009 masih rendah baik persentase maupun besarnya. Dikatakan, hingga akhir tahun 2009 ini penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga hanya akan mencapai 96% atau sebesar Rp 317 triliun.

Menurut Menkeu, rendahnya penyerapan belanja dikarenakan penyelesaian proses administrasi yang masih dominan pada triwulan I dan terjadi peningkatan pencairan pada triwulan II. Bahkan lanjutnya, realisasi belanja modal selama tahun 2009 diperkirakan tidak akan mencapai target sehubungan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. (mp)

Kondisi ini membuktikan tidak ada perbaikan. Kementerian/lembaga masih mencerminkan pola lama yang belum berubah," katanya di Jakarta Rabu (1/7).

Untuk itu lanjut Harry, tahun depan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bagi lembaga/kementerian harus dijalankan. Dia berpendapat, kementerian atau lembaga yang rendah dalam menyerap alokasi belanja akan dikenai sanksi.

Seharusnya, pemerintah dalam penyerapan anggaran mempertimbangkan aspek waktu sehingga tidak selalu

menumpuk pada akhir tahun. Dia mengamati penyerapan belanja sangat buruk meskipun alokasi anggarannya sudah cukup besar.

Lebih lanjut Pimpinan Panggar dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, dalam tiga tahun terakhir tercatat realisasi penyerapan di kementerian/lembaga semester I tahun 2007 28,1 persen dari target belanja dalam APBN 2007 sebesar Rp 258,004 triliun.

Untuk tahun 2008 hanya meningkat menjadi 28,5 persen dari target belanja dalam APBN 2008 sebesar Rp 290 triliun. Sedangkan untuk tahun anggaran 2009

## TARGET PERTUMBUHAN 4 PERSEN KURANG OPTIMAL

Sejumlah anggota Komisi XI DPR menilai target pertumbuhan perekonomian sebesar 4 persen kurang optimal dimana seharusnya pemerintah lebih inovatif dalam memajukan ekonomi khususnya sektor real sehingga target dapat melebihi prediksi.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan Raker dengan Menkeu Sri Mulyani, Menteri Negara PPN/kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Kepala BPS Rusman Heriawan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Hafidz Zawawi, di

Gedung Nusantara I, Kamis, (2/7)

"Sektor real sangat rapuh, dan PHK dimana-mana sedangkan penciptaan wiraswasta baru sangat sulit saat ini,"kata Natsir Mansyur (F-PG).

Menurut Natsir, sekarang ini hampir 60 persen komoditas pangan kita impor mulai dari gandum, telur, tahu, tempe dan kedelai karena itu, kalau kita galakkan industri dalam negeri maka potensinya akan besar. "terlihat tidak ada optimisme dari pemerintah dalam memajukan ekonomi, kita harus menciptakan inovasi yang dapat

menciptakan pertumbuhan 4 persen,"terangnya.

"Dia menambahkan, pemimpin kita tidak mau mengambil resiko dalam memajukan ekonomi sementara sektor domestik tidak digerakan bahkan ekspor kita tidak jalan. "karena itu saya berani adu argumen soal ini, karena industri coklat, vanili cenderung turun,"paparnya.

Dia mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dalam menargetkan pertumbuhan sebesar 4 persen. "belum terlihat langkah real dari pemerintah," terangnya.

Nurlif dari (F-PG) mengatakan, dirinya mengkhawatirkan defisit yang mulai membesar mencapai 2.5 persen dan nantinya akan ditutupi dengan pinjaman luar

negeri lagi. "Jangan sampai menutup defisit dengan utang luar negeri karena secara nominal utang bertambah," katanya.

Menjawab pertumbuhan sektor investasi, Sri Mulyani menerangkan, sektor investasi di kuartal II-2009 masih lemah. "tetapi akan meningkat dan pulih pada kuartal III dan IV tahun ini ditandai dengan masuknya dana asing ke

Indonesia," paparnya.

Menyinggung target inflasi, Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan angka inflasi sebesar 4,3-4,7 persen adalah moderat dan realistis. Karena, inflasi tersebut mampu ditekan dengan alasan angka inflasi di kuartal tiga dan empat tahun lalu sempat mencapai puncaknya akibat kenaikan BBM. "Inflasi 4,3 persen untuk 2009 angka yang moderat dan

sangat realistis," katanya

Dia menambahkan patokan infasi pemerintah pada 2009 sebesar lima persen sebuah gambaran yang pesimistis. "Inflasi sejak bulan April-Juni terus bisa ditekan dan tidak tutup kemungkinan enam bulan ke depan bisa mencapai tiga persen," terangnya. (si)

## DPR DESAK MENEG BUMN SELESAIKAN SENGKETA TANAH SENAMANENEK

000000 00 000 000000000000000000 000000 000000000000 000000  
000000 000000 000000 000000 000000 00000000000000000000 00000000 000000  
000000000000 0000000 2.800 0000000.

Penyelesaiannya melalui mediasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan para pihak yang bersengketa guna mencari solusi penyelesaian secara tuntas dalam batas waktu selambat-lambatnya akhir Agustus 2009.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi (F-PP) dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil di Gedung Nusantara I DPR, Kamis Malam (2/7).

"Awalnya melalui proses mediasi dulu, jadi sifatnya perdata. Mudah-mudahan dengan mediasi ini akan tercapai solusi penyelesaian secara tuntas masalah sengketa tanah Senamanenek," ujarnya.

Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja (F-PG) berpendapat, kalau ada yang bersengketa di pengadilan dan kedua pihak sudah sepakat, itu sudah selesai. Apalagi datanya sudah lengkap baik dari BPN, Desa, Bupati, Gubernur dan sudah ada keputusannya. " Karena itu serahkan saja kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Proses ini sudah terbentuk bahwa sudah ada kesepakatan," terangnya.

Sementara Kepala Desa Semananenek Alwi Arifin menyatakan, bahwa hasil kerja tim penyelesaian tentang kesepakatan antara PTPN V (Persero) dan Masyarakat Adat Senamanenek telah disepakati jumlah (kuantitas) dan kondisi (kuantitas) aset PTPN

V di atas areal seluas 2.800 hektar Tanah Ulayat Senamanenek.

"Peta hasil inventarisasi areal PTPN V yang dituntut masyarakat Sinamanenek seluas 2.800 hektar," kata Alwi. Bentuk dan letak areal yang dituntut oleh masyarakat tersebut sesuai dengan yang tercantum pada peta bidang tanah No.9/99 tanggal 6-3-1999.

Tuntutan yang disampaikan ke Komisi VI DPR oleh Kepala Desa Semananenek Alwi Arifin yang mewakili masyarakat Senamanenek Kabupaten Kampar Riau adalah agar dapat mengambil keputusan akhir dalam bentuk penyerahan areal seluas 2.800 hektar Tanah Ulayat Senamanenek dari PTPN V (Persero) kepada masyarakat adat Senamanenek. "Kalau tidak, saya siap mati syahid," tegasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Meneg BUMN Sofyan Djalil berharap agar penyelesaian masalah lahan Senamanenek ini akan memberikan solusi yang memuaskan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari kalau lahan Senamanenek ini dilepaskan. "Karena kita menggunakan proses peradilan," tegas Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan Djalil, apa yang telah dilakukan selama hampir satu tahun ini bahkan mungkin lebih dari satu tahun, mudah-mudahan akan dapat ditemukan solusi yang paling baik.

### Rapat Kerja Diskors

Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi meminta persetujuan dalam forum agar rapat kerja ini diskors selama sepuluh menit. Dengan alasan untuk mencari titik temu dalam lobby antara Meneg BUMN dengan Dirut PTPN V dan Tokoh Masyarakat Senamanenek terkait dengan masalah sengketa tanah seluas 2.800 hektar.

Sementara itu Cecep Syarifuddin (F-KB) menyatakan dalam forum tidak perlu rapat ini diskors karena ini rapat kerja, dan Meneg BUMN sudah mengerti tujuan kita. "Komisi VI tidak dapat memutuskan secara tuntas," kata Cecep seraya menambahkan Komisi VI itu hanya sebagai pengawasan, budgeting dan legislasi. Jangan terlampaui teknis.

Maksudnya diskors, tegas Azwir Dainyarta (F-PG), karena jalan yang terbaik untuk berunding. "Tapi kalau tidak mau diskors, ya.. kita ambil keputusan saja kalau tidak mau musyawarah lagi," jelasnya.

Akhirnya rapat dapat disetujui diskors selama sepuluh menit untuk berunding. Tapi saat berunding untuk mencari solusi yang terbaik antara Komisi VI, Meneg BUMN, Dirut PTPN V dan Tokoh Masyarakat Senamanenek tiba-tiba salah satu orang dari Serikat Pekerja PTPN V emosi dan marah-marah kepada Anggota Komisi VI. Sempat ia mengatakan kepada Anggota Komisi VI, "Bapak jangan selalu memojokkan Dirut PTPN V dong, saya ini dari PTPN V dan saya akan membela Dirut saya," ujarnya.

Dengan emosi pula Azwir Dainyarta (F-PG) mengatakan, "Anda ini siapa, anda tidak berhak berbicara pada acara ini. Karena ini forum rapat kerja Komisi VI DPR dengan Meneg BUMN," tegasnya. (iw)

## **PARTAI DEMOKRAT DAN PDIP TERIMA DRAFT USULAN RUU BPJS**

**000000 00000000 000 0000 00000000 000000 00000 000 00000  
000000000 0000000 000000 (0000) 0000 00000000 0000 0000000000  
000000 000000000 (00000).**

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia karena itu pemerintah Indonesia harus menggratiskan dua hal pokok ini," papar Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), di ruangan pers room, Jumat, (3/7).

Menurut Eva, pembangunan harus berdasarkan right base development karena itu murni harus dijamin oleh pemerintah. "Kita sudah gagal karena kesepakatan dengan WTO maka keluar

RUU BHP;" terangnya.

Saat ini, terang Eva, Komisi IX DPR berencana menggolkan Rumah Sakit tanpa kelas dan berdasarkan jenis penyakitnya. "Sekarang ini menyalahi aturan dimana adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Eva mengkritisi rancangan dari Gapri, menurutnya, tidak harus dibentuk semacam badan baru karena memang sudah kewajiban negara untuk menjamin

kesehatan rakyatnya. "pada draft RUU susduk nantinya setiap anggota bisa mensponsori dan memasukkan RUU ini menjadi usulan legislasi,"katanya.

Sementara Nurul Iman dari Partai Demokrat mengatakan, draft ini akan segera dibahas meskipun DPR sudah memasuki masa akhir jabatan. "Kita akan bahas RUU ini karena kesehatan merupakan kewajiban dari negara dan amanat kita sebagai anggota dewan,"paparnya.

Juru bicara Gapri Abdul Gofur mengatakan, badan khusus harus dibentuk karena jaminan sosial itu bersifat non profit, gotong royong dan tidak targeted untuk seseorang semata. "Kenapa RUU ini mandek karena pemerintah tidak ingin memajukan RUU karena Jamsostek, Askes, Asabri takut asetnya menjadi nirlaba," katanya. (si)

## **DPR SELESAIKAN 46 RUU PADA SATU TAHUN MASA SIDANG**

**00000 000 000000 00000000 00000000000 000 00 000000  
00000000000000 46 000 0000 0000 00000 0000 0000000. 000 000000000  
000000000000 000000 00 0000 000000000 00000 0000 0000000 00000000  
000 00000000 000000000 00000 00000 00 000000000000 0000000000000  
000 000 000000, 00 0000000000000000, 00 000000000000, 00 000000  
00000 00000000000, 000 00 0000000000 000000,0000000 000000 0000  
000000000000 0000000 000000000 0000 000000 00 000000 200802009,  
00 000000 0000000000 00, 000000, (3/7).**

Agung mengatakan untuk periode DPR Hasil Pemilu 2004, sampai dengan hari ini telah diselesaikan 166 UU dari 284 RUU yang masuk Prolegnas atau baru sekitar 58,5%. "Satu RUU yaitu RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD pembahasannya cukup alot karena ada materi-materi yang sangat mendasar, yang memerlukan pembicaraan yang sangat intens, baik antar anggota pansus maupun antara DPR dengan pemerintah,"ungkapnya.

Menurutnya, RUU ini menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga DPR, DPD, MPR, dan DPRD serta para anggotanya

dalam menjalankan tugas mengemban amanat konstitusi. "RUU ini menjadi penting, selain untuk menata hubungan antar lembaga negara juga mengatur berbagai hak dan fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam implementasi pasal-pasal dalam konstitusi kita," katanya.

Agung mengharapkan, dengan UU ini diharapkan terjadi hubungan antar lembaga yang lebih sinergis dan produktif.

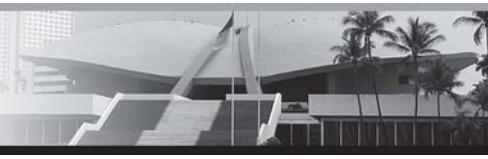
Pada masa bakti ini, DPR tinggal menyisakan satu masa sidang lagi, yaitu Masa Sidang I Tahun Sidang 2009—2010 yang akan dibuka tanggal 14 Agustus 2009 dan akan ditutup 30 September 2009 yang

akan datang. "Ini akan terus akan dioptimalkan untuk dapat diselesaikan beberapa RUU lainnya, di antaranya yang sangat ditunggu masyarakat adalah RUU Pengadilan Tipikor," terangnya.

Dewan, tegas Agung sangat berkomitmen dalam mendukung pemberantasan terhadap korupsi karena itu, Dewan bertekad untuk menyelesaikannya pada periode Dewan yang sekarang ini, sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh putusan MK, bahwa UU ini harus ada sebelum 19 Desember 2009.

Agung mengingatkan kepada seluruh Fraksi untuk menuntaskan RUU yang strategis dan telah memasuki pembicaraan tingkat I sehingga segera masuk kepada tahap berikutnya yaitu tingkat II pengambilan keputusan.

"RUU-RUU tersebut antara lain RUU Narkotika, RUU Perubahan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, RUU tentang Mata Uang, RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, RUU tentang Pembangunan Pedesaan dan beberapa RUU lainnya," terangnya. (si)



## DPR MINTA PEMERINTAH HATI-HATI TERHADAP KENAIKAN HARGA MINYAK

Agung, Ketua DPR, meminta pemerintah untuk berhati-hati terhadap kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2009, karena akan meningkatkan defisit anggaran. Dia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan energi dan transportasi yang berlaku saat ini.

Hal ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga minyak dunia tersebut diyakini akan meningkatkan defisit anggaran. Kemampuan APBN akan tergerus, apabila harga minyak terus meningkat,"terang Agung saat menyampaikan pidato penutupan di hadapan sidang paripurna, Jumat, (3/7).

Sementara itu, tegas Agung, menaikkan harga BBM dalam negeri dalam situasi saat ini belum menjadi solusi salah satu upaya adalah meningkatkan secara maksimal produksi minyak dan gas. "Menaikan lifting minyak 960.000 barrel per hari harus dapat tercapai,"katanya.

Terkait pokok-pokok kebijakan fiskal 2010, kata Agung, perlu disusun secara lebih konservatif dengan mempertimbangkan ruang gerak bagi Presiden dan Anggota DPR Hasil Pemilu 2009 untuk melakukan penyesuaian bilamana diperlukan.

"Pokok-pokok kebijakan fiskal 2010 antara lain mendukung langkah pemulihan perekonomian nasional dengan melanjutkan stimulus fiskal melalui penetapan target defisit RAPBN 2010," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah harus terus meningkatkan program perlindungan kesejahteraan rakyat, pembangunan

infrastruktur, pertanian dan energi serta proyek padat karya, pemulihan dunia usaha dengan pemberian insentif perpajakan dan bea masuk, meneruskan reformasi birokrasi, memperbaiki alutsista, memperbaiki rasio anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945, dan mengoptimalkan pembangunan pedesaan.

Menyinggung pelaksanaan fungsi Anggaran, papar Agung, Dewan pada Masa Sidang ini telah menyelesaikan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2010, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2007 dan akan mulai membahas RUU tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, atau RUU APBN-P 2009.

"Untuk mengejar waktu penyelesaian, Panitia Anggaran akan menggunakan Masa Reses Persidangan IV untuk tetap melakukan pembahasan terhadap RUU ini. Juga, beberapa komisi akan meminta persetujuan bagi penyelesaian pembahasan beberapa RUU dalam masa reses," katanya. (si)

## SIAPAPUN PEMENANG PILPRES, DIALAH PEMIMPIN YANG DIKEHENDAKI RAKYAT

Agung, Ketua DPR, berharap agar siapapun pemenang Pilpres 2009, akan memimpin Indonesia dengan baik, aman, dan sejahtera. Dia juga berharap agar pemerintah akan memperhatikan kepentingan rakyat dan membangun Indonesia yang lebih maju dan adil.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato Penutupan Masa Sidang IV tahun 2008/2009 di depan Sidang Paripurna Jumat (3/7). Ketua Dewan berharap, Pilpres akan berlangsung secara bermartabat, sehingga menghasilkan pemenang yang elegan, dan pihak yang kalah akan menerima secara sportif.

Menurut Agung Laksono, beberapa hari lagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang akan memimpin pemerintahan dan negara untuk lima tahun

ke depan.

Pada hari Minggu (5/7), kampanye akan berakhir. Alhamdulillah, kampanye telah berjalan dengan baik, aman, walaupun dalam proses ini suhu politik cukup memanas. Dalam minggu tenang yang dimulai hari Minggu, Agung mengajak, "Marilah kita ciptakan suasana yang benar-benar kondusif. Jangan lagi ada ucapan-ucapan atau tindakan yang menimbulkan kecurigaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat"

Semua pihak perlu menahan diri dari tindakan-tindakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap Pemilu

yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. " Insya Allah, Tuhan akan meridhoi langkah-langkah kita di dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan," tandas Pimpinan DPR dari FPG.

Kepada segenap rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih, Ketua DPR mengajak untuk menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Dua—tiga menit dalam bilik suara dapat menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Jadikanlah moment Pemilihan Presiden 2009 yang akan datang ini sebagai sarana untuk berpartisipasi membangun demokrasi di negara kita, agar semakin maju. Kedaulatan rakyat sebagai esensi demokrasi Indonesia yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945 harus dapat diwujudkan," ujar Agung menambahkan. (mp)